

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan etnis, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Kekayaan budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, adat istiadat, seni, dan ritual yang unik di setiap suku bangsa, yang dijaga dan dilestarikan dengan penuh komitmen. Sebagai entitas yang dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, budaya memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan nilai-nilai dan mempersatukan masyarakat lintas generasi. Budaya juga menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan warisan leluhur sekaligus mendorong inovasi dan perubahan dalam masyarakat.¹

Masyarakat yang masih menjaga kesakralan wilayah dan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun disebut dengan masyarakat adat. Masyarakat adat biasanya memiliki sistem sosial, hukum adat, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun. Mereka kerap ditemukan di daerah-daerah terpencil atau daerah pedesaan. Sedangkan, wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat ini disebut dengan kampung adat atau kampung

¹ Nursilah, Yusrizah Heniwaty & Tuti Rahayu, *Seni dan Identitas Budaya di Indonesia* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024), pp. 4-5.

budaya. Kampung adat juga dikenal sebagai wilayah yang penduduknya memiliki hubungan erat dengan lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari yang selaras dengan alam.²

Fenomena kampung budaya ini pada dasarnya tidak hanya terbatas pada wilayah pelosok atau pedesaan saja, tetapi juga hadir di kawasan perkotaan Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kampung Kauman di Semarang, yang dikenal sebagai kawasan dengan sejarah panjang dalam perkembangan budaya Islam di Jawa.³ Lalu, terdapat Kampung Budaya Cireundeu di Cimahi Selatan, yang masyarakatnya masih mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka meskipun berada di tengah pertumbuhan kota yang semakin pesat.⁴ Selain itu, terdapat pula Kampung Budaya Silat Bekasi yang berada di kota Jakarta.⁵ Kehadiran kampung budaya di perkotaan ini menjadi contoh nyata bahwa pelestarian warisan budaya tidak berlangsung di daerah pedesaan yang jauh dari perkembangan kota saja.

Meskipun demikian, kampung budaya di wilayah perkotaan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya memajukan dan melestarikan nilai-nilai

² Diky Muhamad Marzuki, *Perubahan Tata Kelola Kampung Adat Dukuh di Cikelet Kabupaten Garut pada Masa Kepemimpinan Mama Uluk Lukman Tahun 1997-2018* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), p. 7.

³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, "Pelestarian Kampung Kauman Kota Semarang sebagai Kawasan Wisata Budaya," dikutip dari <https://dlh.semarangkota.go.id/> pada Desember 2024.

⁴ Whisnu Pradana, "Kampung Adat Cireundeu, Potret Keberagaman di Sudut Kota Cimahi," dikutip dari <https://www.detik.com> pada Desember 2024.

⁵ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Desa Wisata Kampung Budaya Silat Bekasi," dikutip dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/> pada Desember 2024.

tradisional di tengah arus modernisasi. Salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah akulturasi penduduk, yang menyebabkan berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial budaya setempat. Selain itu, permasalahan kualitas lingkungan, seperti tingginya kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur, turut mengancam keberlanjutan kampung budaya.⁶ Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga dan mengembangkan budaya mereka sendiri, sehingga upaya pelestarian sering kali mengalami kendala.

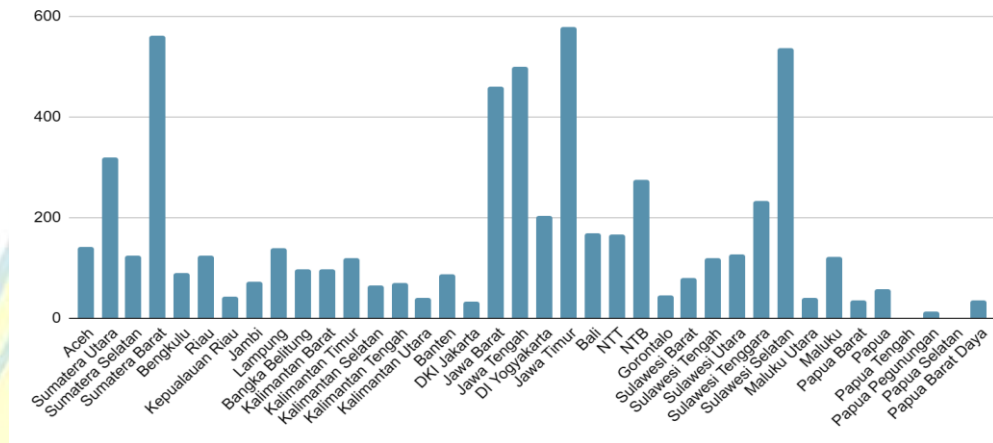
Sebagai upaya untuk mendukung pelestarian budaya di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah menawarkan solusi dengan mengembangkan potensi budaya sebagai daya tarik wisata yang dapat membantu keberlangsungan budaya pada suatu wilayah. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui program desa wisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021 lalu.⁷ Program ini mengusung pendekatan yang berbeda, dengan menekankan pada pemanfaatan potensi alam dan budaya lokal, yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang lebih otentik bagi para pengunjung.⁸

⁶ Alya R. Aisy et al., "Peningkatan Kualitas Kampung Kota dan Dampaknya Terhadap Masyarakat," *ACESA* 6, no. 2, (2024), pp. 79-80.

⁷ Ferdi Rantung, "Anugerah Desa Wisata, Sandi: Ini Bisa Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi Desa," dikutip dari <https://sindonews.com> pada September 2024.

⁸ Syaiful Ade Septemuryantoro, "Potensi Desa Wisata Sebagai Alternatif Destinasi Wisata New Normal," *Jurnal Media Wisata* 19, no. 2 (2021), p. 191.

Gambar 1.1 Jumlah Desa Wisata Berdasarkan Provinsi Tahun 2024



Sumber: Diolah dari data Kemenparekraf, 2024

Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini, program desa wisata sudah tersebar luas pada 38 provinsi di Indonesia, dengan jumlah desa wisata yang tercatat hingga awal tahun 2024 mencapai sebanyak 6.015 desa.⁹ Data ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berpusat di wilayah yang telah maju, tetapi juga melibatkan desa-desa yang memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut. Selain itu, meskipun desa wisata identik dengan kawasan pedesaan, program ini juga telah diterapkan di beberapa wilayah perkotaan besar yang memiliki dinamika tersendiri. Sehingga, dapat diketahui bahwa langkah-langkah pengembangan desa wisata yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dapat dilakukan di lingkungan yang beragam.

⁹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), “Peta Sebaran-Jejarang Desa Wisata: Data Jumlah Desa Wisata Berdasarkan Provinsi Tahun 2024,” <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>, diakses pada Desember 2024.

Adapun desa wisata di wilayah perkotaan salah satunya dapat ditemukan di Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi fenomena menarik karena memperlihatkan bahwa konsep tradisional dapat beradaptasi dengan lingkungan yang modern. Keunikan dari adanya desa wisata di kota Jakarta terletak pada keaslian budayanya dan kemampuannya untuk menjaga identitasnya sambil bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jakarta yang dikenal pula sebagai kota metropolitan, berhasil mengembangkan program desa wisata yang menarik banyak perhatian wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah desa wisata yang terdaftar pada awal tahun pengembangan program hanya berjumlah 1 desa wisata, sedangkan jumlah desa wisata di Jakarta saat ini sudah mencapai 32 desa wisata.¹⁰

Tabel 1.1 Kampung Budaya di Provinsi DKI Jakarta

Kota	Nama	Jumlah
Jakarta Utara	Kampung Tugu	1 (Satu)
Jakarta Selatan	Kampung Budaya Silat Bekasi	2 (Dua)
	Perkampungan Budaya Betawi	
Jakarta Barat	Kampung Silat Rawa Belong	1 (Satu)
Jakarta Timur	Kampung Wisata Budaya Condet	1 (Satu)

Sumber: Diolah dari data Kemenparekraf, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, salah satu kampung budaya di kota Jakarta yang berhasil merintis desa wisata adalah Kampung Budaya Silat Bekasi yang

¹⁰ Bidang Pengolahan Data dan Informasi, *Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020* (Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021), p. 49.

berada di Petukangan, Jakarta Selatan.¹¹ Kampung budaya ini ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2023 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.¹² Keistimewaan Kampung Budaya Silat Bekasi dibandingkan dengan kampung budaya lain di Jakarta terletak pada fokus khasnya terhadap satu aliran silat tradisional Betawi, yaitu Silat Bekasi. Berbeda dari Kampung Silat Rawa Belong yang mewadahi berbagai aliran silat, Kampung Budaya Silat Bekasi menitikberatkan pada pelestarian satu bentuk warisan budaya yang memiliki akar sejarah kuat, khususnya di kalangan masyarakat Betawi. Hingga pada tahun 2015, Silat Bekasi ini berhasil diresmikan sebagai Warisan Budaya Tak Benda milik Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada tahun 2019.¹³

Pengakuan tersebut menjadi penanda penting bahwa pelestarian Silat Bekasi tidak hanya memiliki nilai historis dan kultural, tetapi juga relevansi strategis di masa kini. Dalam menghadapi tantangan arus modernisasi yang cenderung menjauhkan generasi muda dari budaya lokal, pencak silat, termasuk Silat Bekasi, kini mulai dipandang sebagai instrumen pendidikan karakter yang mampu menanamkan nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, solidaritas, dan penghargaan terhadap tradisi. Kesadaran ini turut mendorong munculnya

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Kategori Desa Wisata: Berdasarkan Jenis dan Provinsi,” <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>, diakses pada Desember 2024.

¹² Abdul Fatahillah, “Kampung Silat Bekasi Petukangan Raih Penghargaan dari Kemenparekraf RI,” dikutip dari <https://selatan.jakarta.go.id/> pada Desember 2024.

¹³ Dwi W. Hadi, W. A. Dananto, N. Sambodo & Mas’ad, *Statistik Kebudayaan 2021* (Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2021), p. 25.

inisiatif di tingkat kebijakan, seperti rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan pencak silat sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah, sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Gubernur Rano Karno pada Mei 2025.¹⁴ Kebijakan ini tidak hanya menjadi langkah pelestarian secara sistemik melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga membuka ruang bagi komunitas lokal, terutama di kampung budaya seperti Kampung Budaya Silat Bekasi, untuk berperan lebih aktif dalam transfer nilai budaya kepada generasi muda.

Dalam konteks ini, pelestarian tradisi silat dan keberhasilan Kampung Budaya Silat Bekasi dalam merintis desa wisata tidak terlepas dari peran aktif masyarakat setempat yang menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan perintisan desa wisata. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa desa wisata tidak dapat berjalan tanpa dukungan penuh dari masyarakat lokal yang memiliki kepedulian dan inisiatif dalam melestarikan budayanya. Keberhasilan perintisan desa wisata juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam aspek perencanaan, pengelolaan, hingga promosi untuk destinasi wisata tersebut. Sehingga, Kampung Budaya Silat Bekasi menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat lokal di sana memiliki kesadaran dan rasa memiliki terhadap budayanya dan menunjukkan bagaimana pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata ini tidak dapat berjalan tanpa partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

¹⁴ Kurniawan Fadilah, "Pemrov DKI Bakal Jadikan Pencak Silat Ekskul Wajib di Sekolah," dikutip dari <https://news.detik.com> pada Juli 2025.

Keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam pelestarian budaya dan pengembangan kampung budaya menuju desa wisata tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap tradisi, tetapi juga mencerminkan adanya proses sosial yang berjalan secara timbal balik. Keikutsertaan warga tidak semata-mata muncul secara spontan, melainkan lahir dari relasi sosial yang memungkinkan terjadinya saling memberi dan menerima. Dalam perspektif pertukaran sosial, partisipasi ini dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi yang didasari pada harapan akan manfaat tertentu, baik berupa penghargaan sosial maupun peluang ekonomi. Dengan demikian, partisipasi aktif yang terlihat dalam pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi merupakan wujud dari proses pertukaran sosial yang mendasari keterlibatan kolektif.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji fenomena pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata, dengan menempatkan fokus utama pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang muncul sebagai bagian dari proses pertukaran sosial. Penelitian terdahulu cenderung menekankan pembahasan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata yang sudah maju, sehingga menciptakan kesenjangan penelitian terkait bagaimana partisipasi masyarakat juga menjadi pilar penting dalam perintisan desa wisata. Dalam hal ini, Desa Wisata Kampung Budaya Silat Beksi menjadi pilihan relevan yang menunjukkan adanya pengembangan dari kampung budaya menjadi desa wisata. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam**

**Pengembangan Kampung Budaya Sebagai Proses Pertukaran Sosial
(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta
Selatan).”**

1.2 Permasalahan Penelitian

Dalam upaya mengembangkan Kampung Budaya Silat Bekasi menjadi desa wisata, penting untuk memahami berbagai aspek yang terlibat dalam proses tersebut. Proses pengembangan ini tidak sederhana, karena diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Selain itu, transformasi kampung budaya menjadi desa wisata merupakan proses sosial yang dipenuhi oleh interaksi timbal balik antarwarga, yang pada gilirannya membentuk pola-pola pertukaran sosial. Melalui relasi ini, partisipasi masyarakat tidak muncul sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai bentuk respons terhadap ekspektasi maupun nilai-nilai kolektif yang berkembang di tengah komunitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan kampung budaya ini, serta bagaimana pertukaran sosial di antara masyarakat menjadi dasar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan demikian, untuk memastikan penelitian tetap terarah pada aspek-aspek yang relevan, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dalam pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata?
3. Bagaimana pertukaran sosial yang terjadi dalam pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertukaran sosial yang terjadi dalam pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada kajian ilmu sosiologi dan pariwisata, terutama mengenai pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata dengan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat.
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai teori pertukaran sosial dalam konteks pengembangan desa wisata, serta bagaimana hubungan sosial yang terjalin di antara anggota masyarakat dapat memperkuat partisipasi dalam pengembangan berbasis masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif kepada masyarakat mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal dengan melakukan inovasi atau mengembangkannya menjadi daya tarik wisata yang dapat memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Bagi Pengelola Wisata: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengelola wisata untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal secara lebih luas dan aktif, sehingga menciptakan sinergi antara pengelola dan masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi wisata.
3. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program

pendampingan, pelatihan, serta regulasi yang mendukung keberlanjutan wisata berbasis masyarakat.

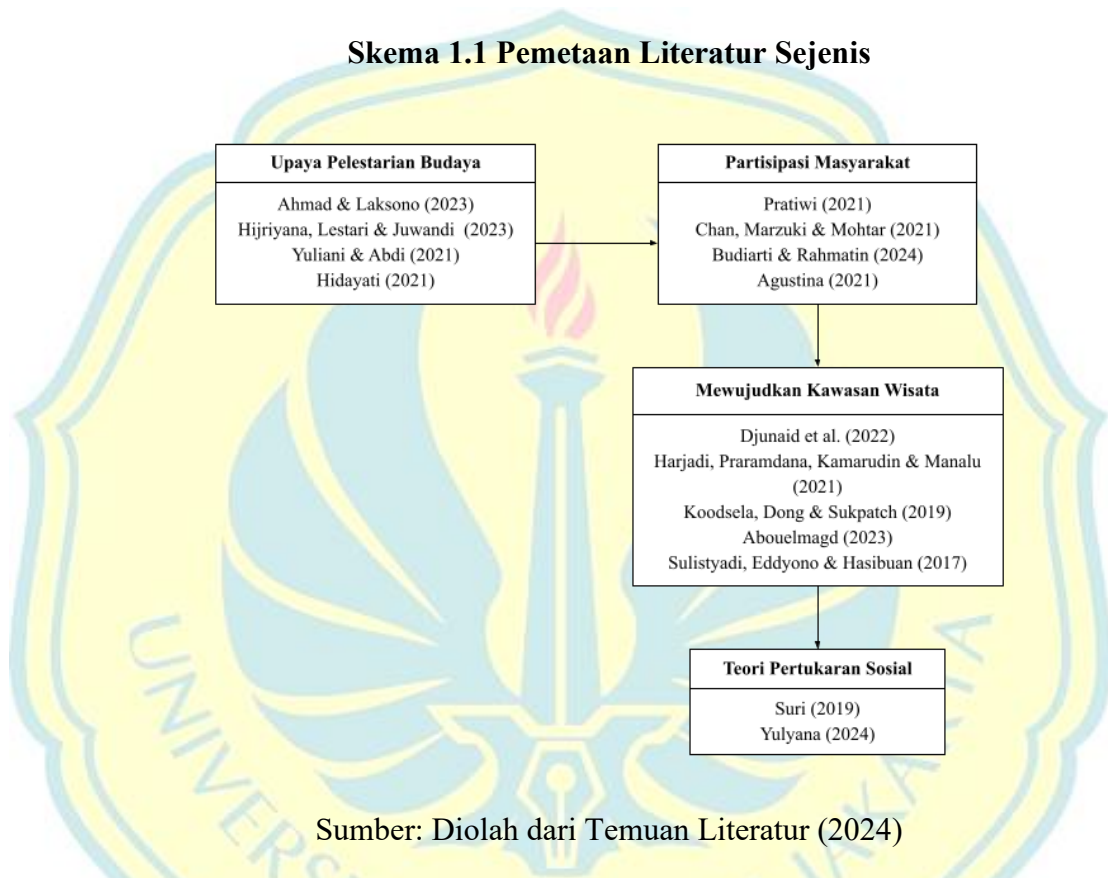
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata di lokasi lain, khususnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam prosesnya.

1.5 Tinjauan Literatur Sejenis

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti telah melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Peninjauan literatur sejenis berguna sebagai panduan untuk peneliti dalam menyusun penelitian dan membantu peneliti untuk memahami lebih dalam terkait dengan topik skripsi yang diangkat. Melalui tinjauan literatur, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian, membuat landasan teoritis yang kokoh, dan menghindari adanya duplikasi. Beberapa literatur sejenis yang peneliti gunakan untuk dijadikan pedoman penelitian berasal dari 7 jurnal nasional, 3 jurnal internasional, 3 skripsi/tesis/disertasi, dan 2 buku. Tinjauan penelitian ini kemudian dibagi menjadi 4 kategori yang meliputi penelitian terkait upaya pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, upaya mewujudkan kawasan wisata, dan penelitian terkait pertukaran sosial. Kategorisasi ini bertujuan untuk

membantu peneliti dalam membandingkan dan mengkontraskan berbagai pandangan atau pendekatan terkait tema tertentu.

Skema 1.1 Pemetaan Literatur Sejenis



Sumber: Diolah dari Temuan Literatur (2024)

Pembahasan literatur sejenis ini diawali dengan penelitian yang mengkaji upaya pelestarian budaya. Dalam konteks pelestarian budaya atau tradisi di tengah arus globalisasi, masyarakat lokal memainkan peran utama dalam melestarikan identitas budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad dan Laksono dalam penelitiannya, keberadaan paguyuban seni menjadi satu cara efektif untuk melestarikan warisan budaya, terutama di kawasan perkotaan

yang sedang berkembang pesat.¹⁵ Keberadaan paguyuban seni ini tidak hanya berfungsi untuk melestarikan seni, tetapi juga meningkatkan jaringan sosial yang penting bagi keberlanjutan komunitas seni. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun tantangan seperti globalisasi dan krisis regenerasi mengancam, upaya bersama dalam paguyuban dan kegiatan sosial dapat menjadi jawaban untuk mengamankan keberadaan seni karawitan di Jurang Blimbing.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hijriyana, Lestari, dan Juwandi terkait upaya pelestarian kearifan lokal mengungkapkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan unsur penting dalam memelihara dan membangun nilai-nilai yang ada saat ini.¹⁶ Koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat mampu memperkuat upaya pelestarian budaya, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan infrastruktur memegang peranan penting dalam rangka menciptakan kondisi yang ramah lingkungan bagi pelestarian kearifan lokal. Namun, meskipun masyarakat Desa Adat Urug masih aktif melestarikan kearifan lokalnya, keselarasan dengan pemerintah daerah belum tercapai secara maksimal. Untuk menjamin keberlanjutan

¹⁵ Isna M. Ahmad & Arido Laksono, "Upaya Paguyuban Budi Laras dalam Pelestarian Seni Karawitan di Kampung Tematik Seni Budaya Jurang Blimbing Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, No. 2, (2023), pp. 1-10.

¹⁶ Siti P. Hijriyana, Ria Y. Lestari & Ronni Juwandi, "Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 13, No. 1, (2023), pp. 1-20.

pelestarian kearifan lokal di era yang dinamis ini, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan potensi lokal menjadi pendorong utama untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi daya tarik yang menguntungkan masyarakat, yaitu daya tarik wisata, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Yuliani dan Abdi.¹⁷ Pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai destinasi wisata yang mampu menarik minat untuk berkunjung. Namun, kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sarana dan prasarana, juga disadari menjadi salah satu kendala dalam kemajuan tempat wisata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun Kampung Saribu Rumah Gonjong memiliki potensi yang sangat besar berdasarkan kesadaran masyarakat dan keberagaman budaya, masih perlu dirampungkan komponen-komponen yang dibutuhkan agar layak menjadi tempat wisata. Oleh karena itu, peningkatan peran serta masyarakat dan pembangunan infrastruktur menjadi solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada dan memaksimalkan potensi pariwisata di wilayah ini.

Di sisi lain, dalam penelitian terkait pembangunan desa wisata berbasis budaya lokal menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.¹⁸

¹⁷ Rozi Yuliani & Moch Abdi, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kampung Saribu Rumah Gonjong," *Menara Ilmu* 15, No. 2, (2021), pp. 85-92.

¹⁸ Al Fida Hidayati, *Pembangunan Desa Wisata Melalui Budaya Lokal (Studi Kasus: Kampung Wayang, Desa Kepuhsari, Wonogiri, Jawa Tengah)* (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2021).

Pemanfaatan aset budaya lokal, seperti seni dan tradisi, dapat menjadi pendorong kuat dalam pengembangan desa wisata, di mana kreativitas masyarakat berperan dalam pengembangan objek wisata yang unik. Selain itu, dukungan dari pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah dan badan swasta menjadi faktor penting untuk memfasilitasi pengembangan infrastruktur dan pemasaran desa wisata. Namun, jebakannya terletak pada komodifikasi budaya, karena nilai-nilai tradisional dapat terdistorsi karena tekanan pasar, sehingga diperlukan tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam kerangka desa wisata.

Penelitian terkait pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan.¹⁹ Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang mendukung program pariwisata. Kontribusi tenaga kerja dan keahlian lebih berharga dibandingkan dengan kontribusi uang, terutama pada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan partisipasi juga menjadi hal penting, sejalan dengan pandangan bahwa dukungan pemerintah dapat memfasilitasi dan memberdayakan peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Untuk

¹⁹ Nana Novita Pratiwi, "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang," *Jurnal Planologi* 18, No. 2, (2021), pp. 177-196.

mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu ada strategi yang mendorong partisipasi aktif semua lapisan masyarakat, di samping memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Penelitian dengan fokus yang sama juga dilakukan pada komunitas lokal di Lower Kinabatangan, Sabah, yang menemukan bahwa meskipun masyarakat menyadari potensi besar untuk pengembangan ekowisata, partisipasi mereka dalam praktik pariwisata bertanggung jawab masih terbatas.²⁰ Hanya sebagian kecil yang terlibat dalam sektor pariwisata, sementara kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya modal dan pemahaman tentang pengelolaan pariwisata. Temuan ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan dukungan finansial yang lebih kuat dari pemerintah agar partisipasi dalam pengembangan pariwisata dapat meningkat. Hal ini akan sangat penting untuk menciptakan destinasi ekowisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Adapun penelitian terkait partisipasi masyarakat lainnya dilakukan di Kampung Lawas Maspati di Surabaya, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan dan

²⁰ Jennifer Kim Lian Chan, K. M. Marzuki & T. M. Mohtar, "Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah," *MDPI Journal* 13, No. 23, (2021).

kesejahteraan masyarakat.²¹ Masyarakat terlibat langsung dalam merancang atraksi wisata, mengenalkan sejarah, serta memproduksi produk UMKM yang berhubungan dengan pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam pengelolaan pariwisata telah memenuhi empat prinsip utama dari *community based tourism* menurut Hatton, yaitu prinsip budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat di Kampung Lawas Maspati terbukti memberikan dampak positif yang luas, baik dalam mempertahankan keberlanjutan pariwisata maupun dalam meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga setempat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, mereka mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik, akses yang lebih mudah ke layanan dan fasilitas, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Di samping itu, dukungan dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pariwisata. Penelitian ini menekankan perlunya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan mengelola destinasi wisata untuk

²¹ Badai Elsadhai Budiarti & Leily Suci Rahmatin, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Lawas Maspati sebagai Community Based Tourism," *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, No. 7, (2024), pp. 6725-6733.

memastikan manfaat sosial dan ekonomi bisa dinikmati oleh semua pihak, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan.²²

Keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan merupakan dua faktor terpenting dalam menciptakan tempat wisata yang sukses.²³ Pengembangan pariwisata pedesaan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Mendidik dan bersosialisasi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan penerimaan mereka terhadap kegiatan pariwisata, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Cihideung Udik berhasil meningkatkan pengetahuan peserta dan membuktikan bahwa sebagian besar warga merasa bahwa materi yang diajarkan bermanfaat. Namun, ada beberapa keterbatasan seperti perubahan waktu pelaksanaan dan keterbatasan media yang menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang dan penggunaan alat bantu media yang lebih efektif. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa wisata berkelanjutan, penting untuk tetap melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, serta mengatasi hambatan yang ada, sehingga manfaat pembangunan pariwisata dapat dinikmati secara maksimal oleh seluruh warga desa.

²² Made Dian Putri Agustina, *Optimalisasi Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).

²³ Ika S. Djunaid, I. Ardiansyah, Sofiani, D. Fachrureza, V. Soeprapto & Paulina, "Sosialisasi Pembentukan Binaan Desa Cihideung Udik Menjadi Desa Wisata," *Jurnal Abdimas Terapan* 1, No. 2, (2022), pp. 29-32.

Terdapat pula penelitian di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, yang memperlihatkan pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan keindahan alam serta kearifan lokal sebagai daya tarik utama. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan digital marketing untuk meningkatkan daya tarik wisata, terutama untuk menarik wisatawan asing. Melalui pelatihan mengenai pemasaran digital dan strategi promosi wisata, penelitian ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelola obyek wisata tentang pentingnya promosi yang efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai potensi budaya lokal dan pendekatan modern dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan desa wisata yang berkelanjutan.²⁴

Keberlanjutan perencanaan wisata juga sangat bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan dan kesadaran kapasitas lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Koodsela, Dong, dan Sukpatch menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pariwisata perkotaan yang tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan.²⁵ Studi ini juga menyoroti perlunya strategi terpadu dalam mengembangkan rencana pembangunan pariwisata yang mempertimbangkan

²⁴ Dikdik Harjadi, G. K. Praramdana, M. N. Komarudin & V. G. Manalu, "Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Digital Marketing Untuk Mewujudkan Desa Wisata Budaya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1, (2021), pp. 42-53.

²⁵ Wannipa Koodsela, Huang Dong & Kassara Sukpatch, "A Holistic Conceptual Framework into Practice-Based on Urban Tourism Toward Sustainable Development in Thailand," *MDPI Journal* 11, No. 24, (2019).

isu-isu mendasar dalam pembangunan perkotaan dan pariwisata, serta perlunya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Maka, untuk tujuan keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata perkotaan, harus ada kerangka kerja yang memastikan partisipasi aktif dan integrasi kebijakan berkelanjutan ke dalam perencanaan pariwisata.

Penelitian lainnya terkait pariwisata budaya dan pembangunan perkotaan berkelanjutan menegaskan bahwa menyeimbangkan keduanya dapat menghasilkan kontribusi signifikan terhadap pengembangan masyarakat lokal dan pelestarian warisan budaya. Membangun pariwisata budaya bukan hanya alat atraksi wisata, tetapi juga memberdayakan penduduk setempat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya. Selain itu, keberhasilan pengembangan pariwisata budaya sangat bergantung pada infrastruktur dan aksesibilitas yang tepat terhadap situs warisan, yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan keberlanjutan ekonomi lokal, seperti pembangunan perkotaan di Sphinx Avenue, Luxor, yang berhasil meningkatkan wisatawan ke situs warisan budaya.²⁶

Sementara itu, penelitian lain menemukan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan perencanaan yang cermat dan penggunaan indikator yang sesuai untuk menilai keseimbangan antara

²⁶ Doaa Abouelmagd, "Sustainable Urbanism and Cultural Tourism, The Case of The Sphinx Avenue, Luxor," *Alexandria Engineering Journal* 71, (2023), pp. 239-261.

konservasi dan pengembangan ekonomi.²⁷ Temuan ini menggarisbawahi bahwa tanpa partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan pelestarian lingkungan dan budaya, yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Penggunaan indikator yang tepat memungkinkan penilaian yang objektif terhadap pencapaian tujuan tersebut dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat di setiap fase pengembangan.

Kategori terakhir membahas teori pertukaran sosial sebagai alat analisis dalam penelitian. Salah satunya, penelitian yang membahas pembangunan objek wisata Banto Royo yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat Jorong Kaluang Tapi dan seorang investor utama, Ir. H. Andi Syahrani.²⁸ Dalam kerangka teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Peter M. Blau, penelitian ini mengeksplorasi tiga tahap penting dalam proses pembangunan, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan, terjadi musyawarah antara masyarakat dan investor yang menghasilkan berbagai kesepakatan, termasuk

²⁷ Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono & Bernard Hasibuan, *Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat* (Jakarta: CV Anugrah Utama Raharja, 2017).

²⁸ Lusi Andam Suri, *Kerjasama dalam Pembangunan Obyek Wisata Banto Royo Melalui Pariwisata Berbasis Komunitas Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam* (Skripsi, Universitas Andalas, 2019).

peminjaman lahan dan pembagian hasil. Pembangunan fisik dilakukan melalui gotong royong masyarakat, sementara tahap evaluasi melibatkan masyarakat yang bertugas memantau jalannya proyek dengan ketentuan yang telah disepakati. Penelitian ini menyoroti bahwa kerjasama antara masyarakat dan investor juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak lain. Berdasarkan teori Blau, hal ini mencerminkan hubungan timbal balik yang kompleks antara pihak-pihak tersebut, yang saling mengharapkan keuntungan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.

Di sisi lain, penelitian selanjutnya mengkaji pertukaran sosial dalam tradisi nayuh di Pekon Bandar Baru dengan menggunakan teori pertukaran sosial dari Peter M. Blau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori Blau mengutamakan pertukaran berdasarkan keseimbangan antara biaya dan keuntungan, dalam tradisi nayuh masyarakat lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan dan agama. Masyarakat Pekon Bandar Baru melakukan berbagai bentuk pertukaran sosial seperti gotong royong, tolong-menolong, sedekah, dan silaturahmi, yang berlandaskan pada ketulusan dan rasa ikhlas tanpa mengharapkan imbalan langsung. Walaupun teori Blau menganggap adanya unsur *cost* dan *reward* dalam pertukaran sosial, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa di dalam konteks tradisi nayuh, hubungan sosial lebih didorong oleh nilai-nilai moral dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa budaya, pertukaran sosial tidak selalu dipandang sebagai transaksi yang mengharuskan adanya keuntungan langsung, melainkan lebih sebagai

sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan menjaga hubungan antar individu dalam masyarakat.²⁹



²⁹ Wengi Yulyana, *Pertukaran Sosial pada Tradisi Tayuhan Ditinjau dari Teori Peter Blau (Studi di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat* (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2024).

Tabel 1.2 Perbandingan Tinjauan Literatur

No	Judul/Penulis/Jenis Literatur	Teori/Konsep	Metode	Hasil Penelitian
1.	Judul: Upaya Paguyuban Budi Laras dalam Pelestarian Seni Karawitan di Kampung Tematik Seni Budaya Jurang Blimbing Kota Semarang. Penulis: Isna Maulida Ahmad & Arido Laksono. Jurnal Nasional: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, Vol. 6 (2), 2023.	Teori Modal Sosial.	Kualitatif (Etnografi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jurang Blimbing berhasil menjaga eksistensi seni karawitan melalui Paguyuban Budi Laras meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, relokasi pemukiman, dan krisis regenerasi. Upaya pelestarian dilakukan melalui pementasan, publikasi di media massa, dan kegiatan jagongan yang mempererat tali silaturahmi antar anggota sehingga terjalin rasa kebersamaan dan keberlanjutan seni karawitan.
2.	Judul: Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal. Penulis: Siti P. Hijriyana, Ria Y. Lestari & R. Juwandi.	Konsep Sinergitas.	Kualitatif	Hasil penelitian mengungkap bahwa masyarakat Kampung Adat Urug masih melestarikan kearifan lokalnya, termasuk sistem kepercayaan, adat, budaya, norma, dan mitos, meskipun menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan lingkungan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, telah aktif mendukung pelestarian budaya,

	Jurnal Nasional: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 13 (1), 2023.			namun sinergi yang telah terjalin masih belum optimal. Untuk melestarikan kearifan lokal secara berkelanjutan, diperlukan perlindungan hukum, infrastruktur, dan partisipasi langsung dari pemerintah.
3.	Judul: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kampung Saribu Rumah Gonjong. Penulis: Rozi Yuliani & Moch Abdi. Jurnal Nasional: Menara Ilmu, Vol. 15 (2), 2021.	Konsep Daya Tarik Wisata.	Kualitatif (Studi Kasus)	Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendorong pengembangan Kampung Saribu Rumah Gonjong meliputi kesadaran masyarakat yang tinggi, atraksi alam dan budaya, serta pelestarian tradisi dan kearifan lokal. Namun, terdapat faktor penghambat seperti belum terpenuhinya komponen yang diperlukan untuk menjadi objek wisata yang layak dan perlunya peningkatan peran masyarakat.
4.	Judul: Pembangunan Desa Wisata Melalui Budaya Lokal (Studi Kasus: Kampung Wayang, Desa Kepuhsari, Wonogiri, Jawa Tengah). Penulis: Al Fida Hidayati.	Teori Pembangunan Desa oleh Robert Chambers.	Kualitatif	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pembangunan desa wisata didorong oleh faktor internal, seperti pemikiran modern, sumber daya budaya, faktor ekonomi, pelestarian wayang, dan kreativitas masyarakat, serta faktor eksternal, seperti selera pasar dan dukungan pihak luar. Dalam pembangunan desa wisata, komodifikasi budaya terwujud melalui inovasi pada wayang yang mempengaruhi fungsi, bentuk, proses

	Skripsi: Skripsi Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta, 2021.			produksi, distribusi, dan konsumsi wayang.
5.	Judul: Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang. Penulis: Nana Novita Pratiwi. Jurnal Nasional: Jurnal Planologi, Vol. 18 (2), 2021	Teori Partisipasi oleh Keith Davis.	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan didominasi oleh kontribusi tenaga dan keahlian, sementara partisipasi dalam bentuk uang dan barang cenderung rendah. Selain itu, masyarakat yang berusia dewasa dan lansia cenderung memberikan sumbangsih yang lebih besar dalam proses partisipasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan partisipasi.
6.	Judul: Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah. Penulis: Jennifer K. L. Chan, Kamarul M. Marzuki & Tini M.	Konsep <i>tourism area life cycle</i> oleh Butler.	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa komunitas lokal di Lower Kinabatangan menunjukkan partisipasi yang terbatas dalam praktik pariwisata bertanggung jawab (RT) meskipun mereka mendukung pengembangan pariwisata karena manfaat ekonominya. Sebagian besar informan menganggap bahwa pengembangan pariwisata masih dalam tahap awal dan memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi

	Mohtar. Jurnal Internasional: MDPI Journal, Vol. 13 (23), 2021.			komunitas, seperti kurangnya dukungan finansial dari pemerintah dan pelatihan yang memadai.
7.	Judul: Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Lawas Maspati sebagai Community Based Tourism. Penulis: Badai Elsadhai Budiarti & Leily Suci Rahmatin. Jurnal Nasional: JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Vol. 7 (7), 2024.	Konsep <i>community based tourism</i> .	Kualitatif	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Kampung Lawas Maspati menerapkan <i>community based tourism</i> . Warga berperan dalam merancang atraksi, mengenalkan sejarah dan budaya, memproduksi souvenir UMKM, merawat fasilitas dan menjaga lingkungan. Partisipasi ini memenuhi empat prinsip <i>community based tourism</i> menurut Hatton, yaitu budaya, sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mendukung keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
8.	Judul: Optimalisasi Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Penulis: Made Dian Putri Agustina. Buku:	Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat.	Kualitatif	Hasil pembahasan dari buku ini menyatakan bahwa pengembangan desa wisata berbasis masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, serta menjamin keberlanjutan pariwisata di masa depan.

	Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.			
9.	Judul: Sosialisasi Pembentukan Binaan Desa Cihideung Udik Menjadi Desa Wisata. Penulis: Ika S. Djunaid, I. Ardiansyah, Sofiani, D. Fachrureza, V. Soeprapto & Paulina. Jurnal Nasional: Jurnal Abdimas Terapan, Vol. 1 (2), 2022.	Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat.	Metode Campuran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cihideung Udik berhasil memenuhi kebutuhan peserta, dengan 78% setuju bahwa materi yang disampaikan bermanfaat. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang meningkat, dengan 67% setuju bahwa materi yang disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami. Namun, terdapat beberapa kendala seperti perubahan waktu pelaksanaan dan keterbatasan media yang digunakan.
10.	Judul: Pemberdayaan dalam Pengelolaan Digital Marketing untuk Mewujudkan Desa Wisata Budaya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Penulis: Dikdik Harjadi, G. K. Praramdana, M. N.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat.	Kualitatif	Temuan penelitian ini membahas penyuluhan masyarakat di Desa Cisantana yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang potensi wisata budaya, serta mengubah pola pikir dan sikap masyarakat menjadi lebih dinamis dan modern. Peneliti berperan sebagai penyuluh yang mengumpulkan data akurat mengenai masalah, masyarakat, dan wilayah untuk merancang program yang tepat.

	Komarudin & V. G. Manalu. Jurnal Nasional: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 (1), 2021.			
11.	Judul: A Holistic Conceptual Framework into Practice-Based on Urban Tourism Toward Sustainable Development in Thailand. Penulis: Wannipa Koodsela, Huang Dong & Kassara Sukpatch. Jurnal Internasional: MDPI Journal, Vol. 11 (24), 2019.	Konsep <i>sustainable development</i> .	Metode Campuran	Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas dan kesiapan daerah Chiang Mai untuk pengembangan pariwisata perkotaan menuju keberlanjutan sangat tinggi. Temuan-temuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pembangunan pariwisata perkotaan dapat diarahkan menuju keberlanjutan, dengan memperhatikan kapasitas daerah, partisipasi pemangku kepentingan, dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
12.	Judul: Sustainable Urbanism and Cultural Tourism: The Case of the Sphinx Avenue, Luxor. Penulis: Doaa Abouelmagd.	Konsep indikator kebudayaan 2030 oleh UNESCO.	Metode Campuran	Penelitian menemukan bahwa pembangunan perkotaan di kota Luxor (Sphinx Avenue) telah meningkatkan jumlah pengunjung ke situs warisan budaya di kota tersebut. Hasil dari kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan layanan dan fasilitas tertentu untuk meningkatkan kualitas aktivitas pariwisata dan budaya di Luxor.

	Jurnal Internasional: Alexandra Engineering Journal, Vol. 71, 2023.			
13.	Judul: Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat. Penulis: Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono & Bernard Hasibuan. Buku: Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.	Pariwisata Berkelanjutan.	Metode Campuran	Hasil temuan keseluruhan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang, penggunaan indikator yang tepat, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara konservasi dan pengembangan ekonomi. Pembahasan dalam buku ini mengidentifikasi berbagai jenis indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pariwisata.
14.	Judul: Kerjasama dalam Pembangunan Obyek Wisata Banto Royo Melalui Pariwisata Berbasis Komunitas Jorong Kaluang Tapi, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Penulis:	Teori pertukaran sosial oleh Peter M. Blau.	Kualitatif	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pembangunan wisata Banto Royo melibatkan kerja sama antara masyarakat Jorong Kaluang Tapi dan investor utama. Menggunakan teori pertukaran sosial Peter M. Blau, penelitian ini menyoroti tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dalam pembangunan Banto Royo tidak berupa gotong royong saja, tetapi juga kolaborasi dengan pihak lain.

	Lusi Andam Suri. Skripsi: Skripsi Sosiologi, Universitas Andalas, 2019.			
15.	Judul: Pertukaran Sosial pada Tradisi Tayuhan Ditinjau dari Teori Peter Blau (Studi di Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Penulis: Wengi Yulyana. Skripsi: Skripsi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.	Teori pertukaran sosial oleh Peter M. Blau	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa tradisi nayuh di Pekon Bandar Baru mencerminkan pertukaran sosial melalui gotong royong, tolong-menolong, sedekah, dan silaturahmi. Berbeda dengan teori pertukaran sosial Peter Blau yang menekankan keseimbangan <i>cost</i> dan <i>reward</i> , masyarakat lebih dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan agama, sehingga partisipasi mereka didasarkan pada ketulusan tanpa mengharapkan imbalan. Faktor ini menjadikan tradisi nayuh tetap lestari hingga kini.

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

Intelligentia - Dignitas

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kampung Budaya

Kampung budaya merupakan konsep yang mengacu pada suatu komunitas atau wilayah yang berfungsi sebagai ruang untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai elemen budaya yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini, kampung budaya bukan sekedar tempat hunian, melainkan sebuah entitas sosial yang berupaya untuk mempertahankan dan memperkaya nilai-nilai budaya lokal yang telah ada sejak lama. Kampung budaya ini berfungsi sebagai tempat untuk mengekspresikan berbagai aspek budaya, seperti sistem kepercayaan, seni, mata pencaharian, teknologi, komunikasi sosial, serta pengelolaan lingkungan dan tata ruang.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kampung budaya menjadi tempat bagi masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, sekaligus mengaktualisasikan budaya mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Kampung budaya juga dikenal dengan keberadaan arsitektur tradisional yang sangat kental, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat setempat yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Kampung adat atau kampung budaya pada umumnya memiliki bentuk arsitektur yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, yakni adanya bangunan-

³⁰ Reny Triwardani & Christina Rochayanti, "Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal," *Reformasi* 4, No. 2, (2014), pp. 102-110.

bangunan di dalamnya yang mencerminkan gaya hidup dan adat yang terus dijaga oleh generasi penerus. Oleh karena itu, kampung budaya berperan penting dalam menjaga estetika dan ciri khas arsitektur lokal yang mencerminkan identitas masyarakat yang bersangkutan.

Kampung budaya berperan sebagai tempat yang memungkinkan pelestarian kebiasaan-kebiasaan asli masyarakat, yang belum terpengaruh oleh budaya modern. Salah satu ciri utama kampung budaya adalah adanya kebiasaan dan tradisi yang terus dijaga dengan baik oleh masyarakat, meskipun berada di tengah-tengah perkembangan perkotaan.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kampung budaya seringkali terletak di kawasan yang lebih modern atau perkotaan, masyarakat di dalamnya tetap mempertahankan pola hidup tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Keberadaan kampung budaya di tengah perkotaan membuktikan bahwa meskipun lingkungan sekitar telah berubah, nilai-nilai tradisional yang hidup di dalamnya tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan ciri khas yang dimilikinya.

Kampung budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan lokal, yang dapat berkembang lebih lanjut dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di kampung budaya aktif berpartisipasi dalam menjaga dan mengembangkan

³¹ Yasser Basuwendro, *Arahan Pelestarian Kampung Budaya di Kota Surabaya* (Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016).

potensi budaya mereka, dengan cara mengkombinasikan pengetahuan tradisional dengan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman.³² Kampung budaya juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan budaya yang bersifat produktif, misalnya dengan mengembangkan seni dan kerajinan lokal, atau mempromosikan produk-produk tradisional yang dapat mendukung ekonomi lokal.

1.6.2 Desa Wisata

Desa dengan segala kekayaan alam dan kearifan lokal kultural yang dimilikinya memiliki potensi yang besar sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya, desa dapat menjadi magnet bagi para pengunjung atau wisatawan yang ingin merasakan pengalaman yang autentik dan berkesan. Konsep desa wisata sendiri merujuk pada wilayah pedesaan yang memiliki keunikan tersendiri, baik itu dalam segi keindahan alamnya, keaslian adat istiadat dan budayanya, maupun dalam penawaran atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang bisa dinikmati dan dibutuhkan oleh para pengunjung atau wisatawan.³³ Di dalam desa wisata, terdapat beragam pengalaman yang dapat dipelajari dan dinikmati, mulai dari kegiatan sehari-hari masyarakat lokal, ragam kuliner khas, hingga tradisi-tradisi yang masih dijaga dengan ketat.

³² Novi Irawati, *Pola Pengembangan Desa Mandiri* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

³³ Erika Revida et al., *Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi dan Dampak Kunjungan Wisata* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), pp. 3-5.

Pada dasarnya, desa wisata sendiri perlu memenuhi sejumlah kriteria yang diantaranya adalah: 1) Memiliki potensi daya tarik wisata; 2) memiliki komunitas masyarakat; 3) memiliki potensi sumber daya manusia lokal; 4) memiliki kelembagaan pengelolaan; 5) memiliki ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar; dan 6) memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.³⁴ Desa wisata di Indonesia juga terbagi menjadi tiga produk unggulan, yaitu berbasis budaya, alam, dan kreatif. Desa wisata berbasis budaya menghadirkan warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam, mulai dari tradisi, seni, adat istiadat, hingga kuliner khas setiap daerah. Desa wisata berbasis alam menawarkan keindahan alam yang masih alami dan belum terjamah oleh perkembangan modernisasi. Desa wisata berbasis kreatif menghadirkan keberagaman industri kreatif Indonesia, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, desain, dan lain-lain.

Untuk membentuk desa wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan arahan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan.³⁵ Yang pertama adalah mengidentifikasi potensi yang ada di wilayah masing-masing. Tahap ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membentuk desa wisata. Potensi yang dimaksud yaitu, meliputi keindahan alam, kekayaan budaya, warisan sejarah, kuliner lokal, dan sebagainya. Dalam langkah ini, masyarakat yang harus bergerak untuk melihat, merasakan, dan mengeksplorasi

³⁴ Agnes Wirdayanti et al., *Pedoman Desa Wisata* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), pp. 28-29.

³⁵ Ibid., pp. 36-37.

sendiri keunikan yang dimiliki oleh daerahnya. Kemudian, yang kedua adalah dengan membuat program aktivitas atau paket wisata yang dapat dijadikan daya tarik bagi pengunjung. Aktivitas wisata ini tidak lain dan tidak bukan merupakan aktivitas yang pada dasarnya menjelajahi keunikan suatu daerah, baik yang berbasis alam maupun budaya. Terakhir adalah membuat program promosi atau pemasaran secara efektif. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform atau media yang memungkinkan untuk menaikkan target pasar.

Disamping itu, pengembangan desa wisata merupakan sebuah proses yang dapat dijabarkan melalui empat kategori utama, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.³⁶ Proses penentuan klasifikasi desa wisata ditangani oleh Perangkat Desa yang memiliki tugas di bidang pariwisata, bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. Melalui kolaborasi antara Perangkat Desa dan OPD, diharapkan dapat tercipta sinergi yang maksimal dalam mengembangkan desa wisata, mulai dari tahap rintisan hingga tahap mandiri, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya tarik pariwisata di tingkat regional maupun nasional.

³⁶ Wirdayanti et al., op. cit., pp. 42-44.

1.6.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan, termasuk melibatkan mental, emosional, dan fisik orang tersebut dalam memanfaatkan semua kemampuan yang dimiliki agar dapat bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya untuk mencapai suatu tujuan.³⁷ Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Keterlibatan ini sendiri tidak hanya sebatas mengikuti kegiatan, tetapi juga meliputi peran penting dari masyarakat dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.³⁸ Masyarakat dapat memberikan masukan dan pandangan mengenai keputusan yang akan diambil. Partisipasi masyarakat juga melibatkan tanggung jawab dalam memikul beban yang kemungkinan akan muncul pada proses pembangunan. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk memetik hasil atau manfaat dari pembangunan tersebut.

Pada dasarnya, masyarakat cenderung berpartisipasi dalam suatu aktivitas atau program apabila terdapat beberapa faktor yang mendorong partisipasi mereka.³⁹ Pertama, individu atau kelompok akan berpartisipasi jika mereka menganggap suatu isu atau kegiatan memiliki signifikansi bagi kehidupan

³⁷ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), p. 50.

³⁸ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), p. 14.

³⁹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), pp. 100-101.

mereka. Kedua, partisipasi meningkat ketika masyarakat merasa bahwa tindakan mereka dapat memberikan dampak nyata, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas secara luas. Ketiga, penting untuk mengakui dan menghargai berbagai bentuk partisipasi yang mungkin berbeda antara satu individu dengan yang lain. Keempat, peluang serta dukungan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif harus tersedia agar partisipasi dapat berjalan dengan optimal. Terakhir, struktur serta mekanisme partisipasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga inklusif dan tidak bersifat eksklusif atau membatasi keterlibatan masyarakat.

Partisipasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.⁴⁰ Partisipasi vertikal terjadi ketika masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan yang dikelola oleh pihak lain, yakni posisi masyarakat berada dalam status yang lebih rendah, yakni sebagai bawahan, pengikut, atau klien. Dalam arti lain, masyarakat cenderung hanya mengikuti arahan atau kebijakan yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang tanpa memiliki kontrol penuh terhadap keputusan yang diambil. Sedangkan, partisipasi horizontal merupakan bentuk keterlibatan yang lebih mandiri, yang berarti bahwa masyarakat memiliki inisiatif sendiri untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau program. Pada partisipasi ini, setiap anggota atau kelompok masyarakat berkolaborasi secara setara satu dengan yang lainnya. Partisipasi ini

⁴⁰ Dwiningrum, op. cit., p. 58.

juga menjadi indikasi penting dari tumbuhnya masyarakat yang semakin mampu berkembang secara mandiri.

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan. Menurut John Cohen dan Norman Uphoff, tahapan-tahapan tersebut meliputi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi.⁴¹ Salah satu cara untuk mewujudkan berbagai tahapan tersebut adalah dengan membuka forum-forum yang memungkinkan masyarakat umum untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Forum ini dapat berbentuk musyawarah, pertemuan publik, ataupun konsultasi terbuka, yaitu ketika warga masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau saran mereka terhadap kebijakan yang akan diterapkan.⁴² Partisipasi langsung dari masyarakat memungkinkan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dan berpotensi dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk pemikiran, ide, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan. Partisipasi semacam ini dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil sekaligus memperkuat komitmen dan motivasi individu atau kelompok terhadap implementasi keputusan tersebut.

Pada tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas menjadi penerima manfaat dari suatu kegiatan atau program, tetapi juga mereka

⁴¹ Ibid., p. 62.

⁴² Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2014), pp. 198-199.

turut serta dalam proses pelaksanaan dengan berbagai bentuk kontribusi yang dapat mereka berikan.⁴³ Bentuk partisipasi yang paling umum dalam tahap pelaksanaan adalah melalui pemberian tenaga fisik, yakni masyarakat secara kolektif menyumbangkan waktu dan usaha untuk mencapai tujuan bersama. Selain tenaga fisik, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan juga dapat diwujudkan melalui kontribusi finansial mereka. Maksud dari kontribusi ini adalah bahwa masyarakat diminta atau secara sukarela memberikan dana mereka untuk membantu pembiayaan proyek atau program yang sedang berjalan. Partisipasi pada tahap pelaksanaan pun dapat diwujudkan melalui sumbangan material atau barang untuk mendukung pelaksanaan proyek atau program. Kontribusi ini sangat penting, terutama dalam kegiatan lokal karena sumber daya alam setempat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum.⁴⁴

Dalam pelaksanaan ini juga, masyarakat mengerahkan partisipasi dalam bentuk keahlian.⁴⁵ Partisipasi melalui keahlian ini melibatkan pemberian keterampilan khusus oleh individu untuk mendukung berbagai usaha dalam mencapai tujuan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi berbasis keahlian diwujudkan melalui pemanfaatan keterampilan tertentu. Dengan memberikan keahlian yang dimiliki, individu dan kelompok dapat membantu

⁴³ Dwiningrum, loc. cit.

⁴⁴ Theresia, loc. cit.

⁴⁵ Achmad Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 1988), p. 16.

mengembangkan berbagai bidang pekerjaan, meningkatkan efektivitas kegiatan, serta mendorong inovasi dalam lingkungan sosial dan profesional. Masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk material yang merujuk pada keterlibatan individu dalam memberikan kontribusi nyata berupa aset atau barang pribadi demi kepentingan bersama. Dalam konteks pembangunan, bentuk partisipasi ini dapat berupa sumbangan tanah, fasilitas, atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas publik, termasuk destinasi wisata.

Tahap partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga hasil dari suatu proyek atau program setelah selesai dikerjakan.⁴⁶ Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil juga berpengaruh terhadap bagaimana kualitas hasil yang dicapai, karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula kemungkinan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dari segi kualitas, partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar memiliki dampak yang signifikan dan relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Sementara, dari segi kuantitas, partisipasi masyarakat juga berperan dalam menentukan seberapa luas dampak dari program tersebut dapat dirasakan. Ketika masyarakat berpartisipasi aktif,

⁴⁶ Dwiningrum, loc. cit.

program tersebut memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dan memberikan manfaat yang lebih merata.

Pada tahap evaluasi, partisipasi masyarakat sangat penting karena berkaitan erat dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menilai sejauh mana suatu proyek atau program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi, masyarakat dapat memberikan masukan berharga mengenai apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi juga membantu memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan mereka terwakili dengan baik dalam penilaian hasil program. Melalui partisipasi dalam evaluasi, masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka terkait dengan proyek atau program yang dijalankan. Evaluasi yang melibatkan masyarakat juga dapat membantu perencanaan program yang lebih baik di masa depan.

Pada tahap-tahap partisipasi masyarakat sendiri, terdapat berbagai faktor hambatan yang kerap ditemukan.⁴⁷ Faktor pertama adalah adanya sifat buruk yang melekat pada anggota masyarakat, seperti malas, apatis, dan tidak mau melakukan perubahan. Hambatan partisipasi juga disebabkan oleh aspek-aspek tipologis, yakni perbedaan tipe atau kategori dalam masyarakat dapat berpengaruh terhadap partisipasi. Faktor geografis juga dapat mempengaruhi kemampuan dan peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan

⁴⁷ Ibid., p. 57.

atau kegiatan sosial. Selain itu, faktor demografis, seperti jumlah penduduk atau masyarakat dalam suatu wilayah dapat menghambat partisipasi apabila jumlah masyarakat terbilang sedikit. Terakhir adalah faktor ekonomi yang merujuk pada kondisi keuangan masyarakat. Apabila masyarakat mengalami kondisi ekonomi yang buruk atau tidak berkecukupan, hal ini akan berpengaruh terhadap keterlibatan mereka dalam pembangunan atau inisiatif sosial karena kurangnya akses ke sumber daya.

Hambatan partisipasi masyarakat ini dibedakan menjadi dua kategori.⁴⁸ Kategori pertama adalah keterbatasan ruang partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat memiliki arena berupa ruang partisipasi agar individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ruang partisipasi dalam hal ini tidak terbatas pada makna spasial (tempat), tetapi juga ruang berupa forum atau media lain yang memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat mengakses secara bersama-sama. Dengan demikian, terbatasnya ruang partisipasi masyarakat menjadi hambatan bagi masyarakat karena mereka tidak dapat mengakses secara terbuka dan adil. Hambatan kedua adalah melemahnya modal sosial. Modal sosial dalam konteks interaksi sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal. Sehingga, melemahnya modal sosial berdampak pada akses masyarakat

⁴⁸ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Malang: Setara, 2012), p. 135.

terhadap kekuasaan dan sumber daya yang menjadi pembuat keputusan dan kebijakan dilakukan.

Sementara itu, untuk memajukan partisipasi, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan.⁴⁹ Pendekatan pertama adalah pendekatan pasif yang bersifat vertikal, yaitu masyarakat berada dalam posisi yang diatur atau dibimbing oleh pihak eksternal, sehingga pendekatan ini juga dikenal dengan komunikasi satu arah. Pendekatan kedua adalah pendekatan partisipasi aktif, yaitu pendekatan yang memberikan kesempatan lebih pada masyarakat agar bisa lebih aktif dan berinteraksi dengan para petugas eksternal, seperti pelatihan dan kunjungan. Selanjutnya, ada pendekatan partisipasi dengan keterikatan, yakni pendekatan yang memberikan kesempatan pada masyarakat atau individu untuk melakukan pembangunan dan masyarakat bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Pendekatan keempat merupakan pendekatan partisipasi setempat yang menggambarkan bahwa kegiatan pembangunan dihasilkan dari keputusan masyarakat setempat.

1.6.4 Teori Pertukaran Sosial oleh Peter Michael Blau

Peter Michael Blau mengembangkan teori sosial yang berlandaskan pada perilaku manusia, yang kemudian dikenal sebagai teori pertukaran. Dalam teorinya, Blau berusaha mengidentifikasi berbagai bentuk proses pertukaran yang terjadi baik dalam skala kecil (mikro) maupun besar (makro), dengan

⁴⁹ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan bagi Praktisi Lapangan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), pp. 62-63.

menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar individu serta pertukaran yang berlangsung di dalam organisasi atau kelompok.⁵⁰ Blau berpendapat bahwa memahami interaksi langsung antar individu merupakan kunci utama untuk merumuskan dasar dalam menganalisis struktur sosial, yang pada akhirnya menciptakan dan memperkuat dinamika sosial dalam perkembangannya. Dengan kata lain, teori pertukaran sosial Blau menggambarkan pola hubungan yang berkembang dari tingkat individu hingga skala yang lebih luas, mencerminkan pergeseran dari ranah mikro ke ranah makro.

Blau mengembangkan teorinya tentang pertukaran sosial dengan merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh George C. Homans. Berbeda dengan Homans yang lebih menitikberatkan pada interaksi dalam lingkup individu atau tingkat mikro, Blau menjelaskan bahwa mekanisme dasar pertukaran sosial dapat berkembang menjadi struktur sosial yang lebih kompleks.⁵¹ Menurut Blau, interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus bergantung pada respons dari individu lain. Jika respons yang diharapkan tidak terjadi, maka interaksi tersebut akan berhenti. Pada dasarnya, individu menjalin hubungan sosial karena adanya ketertarikan satu sama lain, yang dapat didasarkan pada berbagai

⁵⁰ Doyle Paul Johnson, *Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach* (New York: Springer, 2008).

⁵¹ George Ritzer & Dougla J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6* (Jakarta: Kencana, 2005).

faktor. Setelah hubungan awal terbentuk, pemberian imbalan dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan yang telah terjalin.⁵²

Teori pertukaran sosial merupakan teori yang menyoroti adanya keterkaitan antara perilaku individu dan lingkungan yang saling mempengaruhi (reciprocal).⁵³ Pendekatan ini digunakan untuk membantu memahami bagaimana interaksi sosial yang berlangsung di antara individu dalam suatu komunitas secara keseluruhan berperan dalam membentuk struktur sosial, norma, serta pola hubungan yang berkembang.⁵⁴ Selain itu, teori ini menegaskan bahwa interaksi sosial berlangsung berdasarkan prinsip pertukaran antara individu. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat terlibat dalam interaksi sosial dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu sekaligus menghindari potensi kerugian.⁵⁵

Menurut perspektif Blau, pertukaran sosial terjadi ketika individu terlibat dalam hubungan timbal balik dengan memberikan dan memperoleh imbalan dalam interaksi sosial mereka. Dalam proses pertukaran sosial, terdapat tiga elemen penting yang diidentifikasi oleh Blau, yaitu aktor, imbalan, dan biaya.⁵⁶

Aktor dalam proses ini memiliki kebutuhan atau tujuan tertentu yang

⁵² Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life 2nd Edition* (New York: Routledge, 1986), p. 6.

⁵³ Nina W. Syam, *Psikologi Sosial sebagai Akar Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012).

⁵⁴ L. D. Molm, "Social Exchange Theory" dalam *Contemporary Social Psychological Theories*, ed. Peter J. Burke (Stanford: Stanford Social Sciences, 2006), p. 24.

⁵⁵ Cicilia L. Rembulan & Putri Ayu P. W., *Pertukaran Sosial: Teori, Aplikasi dan Evaluasi dalam Berbagai Konteks* (Surabaya: Universitas Ciputra, 2024), p. 3.

⁵⁶ Blau, loc. cit.

menentukan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Imbalan atau reward adalah segala sesuatu yang diterima atau diberikan dalam pertukaran sosial, baik bersifat material maupun non-material, dengan nilai yang bervariasi bagi setiap orang. Sementara itu, biaya atau cost merujuk pada sumber daya yang dikeluarkan oleh individu dalam interaksi sosial, seperti waktu, tenaga, atau aset lainnya. Hubungan sosial yang dilandaskan cost dan reward ini lah yang menjadi ciri khas dari teori pertukaran sosial.⁵⁷

Dalam teorinya, Blau juga menerangkan bahwa ketika salah satu pihak dalam hubungan pertukaran membutuhkan sesuatu dari pihak lain, namun tidak memiliki imbalan yang setara untuk ditukar, maka dapat melahirkan kekuasaan oleh pihak tertentu. Pada situasi ini, pihak yang lebih bergantung cenderung patuh atau tunduk pada pihak yang memiliki sumber daya atau kemampuan memberi imbalan. Disamping itu, orang-orang yang mampu memberikan banyak keuntungan atau imbalan dalam interaksi sosial, cenderung diakui sebagai pemimpin atau pihak atasan. Meskipun begitu, kekuasaan juga harus dianggap sah dan adil oleh bawahan karena hubungan kekuasaan tetap berjalan berdasarkan norma timbal balik dan keadilan. Perlu adanya aturan atau nilai bersama yang menentukan kapan dan bagaimana kekuasaan digunakan. Jika tidak, maka akan terjadi ketegangan atau penolakan.⁵⁸

⁵⁷ Johnson, loc. cit..

⁵⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi Ke-8* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), pp. 727-732.

Blau menyatakan bahwa pertukaran sosial memiliki dua karakter utama, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Hubungan sosial yang bersifat intrinsik terjadi ketika individu dalam suatu interaksi saling mencintai, sehingga hubungan tersebut berdampak pada dinamika sosial mereka. Dengan kata lain, Blau menekankan bahwa esensi dari hubungan sosial tidak hanya bergantung pada bagaimana makna hubungan itu dibentuk. Ini menjadi aspek krusial dalam interaksi sosial. Sedangkan, hubungan sosial yang bersifat ekstrinsik cenderung melibatkan aspek emosional, abstrak, dan kasih sayang, namun memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat di luar hubungan itu sendiri, seperti dalam pertukaran ekonomi. Dalam praktiknya, dinamika hubungan sosial tidak selalu mengikuti pola yang tetap, bisa saja berawal dari sifat ekstrinsik lalu berkembang menjadi intrinsik, atau tetap berada dalam salah satu sifat tersebut.

Untuk menjelaskan teori pertukaran sosial lebih dalam, Blau menegaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dalam pertukaran sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Prinsip rasionalitas (*rationality principles*), yang menyatakan bahwa ketika semakin banyak individu yang saling mengandalkan manfaat dalam suatu aktivitas, maka semakin besar pula kemungkinan keterlibatan dan perhatian mereka terhadap suatu kegiatan.

⁵⁹ Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory 6th Edition* (Belmont: The Dorsey Press, 1974).

- b. Prinsip timbal balik (*reciprocity principles*), yang menyatakan bahwa ketika semakin banyak individu yang saling memberikan hadiah, maka peluang untuk terjadinya pertukaran timbal balik di masa mendatang juga semakin besar. Jika interaksi saling memberi ini tidak dilakukan, maka individu yang melanggar prinsip ini berisiko untuk menerima sanksi negatif.
- c. Prinsip keadilan (*justice principles*), yang menerangkan bahwa semakin banyak hubungan yang terjalin, semakin luas pula jaringan relasi yang terbentuk, yang dikenal sebagai norma pertukaran. Prinsip ini menitikberatkan pada keadilan dalam interaksi sosial.
- d. Prinsip peminggiran kelompok (*marginal utility principles*), yang menyatakan bahwa nilai dan perhatian terhadap suatu aktivitas akan semakin berkurang seiring dengan semakin berkurangnya intensitas atau keterlibatan individu dalam suatu aktivitas.
- e. Prinsip ketidakseimbangan (*imbalance principles*), yang menerangkan bahwa ketika satu pihak memberikan imbalan lebih banyak dibanding pihak lain, ini dapat memunculkan kekuasaan oleh pihak yang memberi lebih banyak dan subordinasi oleh pihak yang memberi lebih sedikit.

1.6.5 Hubungan Antar Konsep

Dari keseluruhan konsep yang telah dijelaskan, setiap konsep tersebut memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Kampung

budaya merupakan ruang pelestarian nilai-nilai tradisional, yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, sehingga kampung budaya tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga dapat berfungsi untuk menarik kunjungan wisatawan sebagai bentuk pemanfaatan potensi budaya secara ekonomi. Peralihan dari kampung budaya menjadi desa wisata melibatkan proses interaksi sosial yang intens di antara berbagai aktor, seperti masyarakat lokal, pengelola, maupun pihak luar. Dalam konteks ini, teori pertukaran sosial Peter Michael Blau memberikan kerangka untuk memahami bagaimana interaksi tersebut dibentuk oleh harapan akan timbal balik yang saling menguntungkan.

Teori ini juga berkaitan dengan konsep partisipasi masyarakat, yang membantu memberikan pemahaman bahwa individu atau kelompok dalam masyarakat sendiri cenderung berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan apabila mereka melihat adanya manfaat atau imbalan yang dapat diperoleh. Dalam konteks partisipasi, masyarakat menjadi subjek aktif yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kampung budaya, serta memungkinkan masyarakat untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran nilai, pengetahuan, dan sumber daya yang terjadi dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dilihat sebagai proses pertukaran sosial, karena dalam setiap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan kelompok

dalam masyarakat. Adapun hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui skema 1.2 berikut.

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Interpretasi Peneliti, 2024

1.7 Metodologi Penelitian

Pada sub-bab ini, peneliti menguraikan metodologi penelitian yang digunakan untuk memperoleh data. Penjelasan tersebut mencakup pendekatan penelitian yang dipilih, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta peran peneliti dalam proses penelitian. Pembahasan juga mencakup teknik-teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan teknik triangulasi data guna memastikan keakuratan dan keberagaman sumber informasi.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penggunaan pendekatan kualitatif sendiri bertujuan agar fenomena penelitian dapat dipahami dengan baik melalui interaksi yang melibatkan peneliti dengan subjek melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi.⁶⁰ Sesuai dengan tujuan tersebut, pemilihan pendekatan kualitatif berangkat dari kebutuhan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti, yakni partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata. Melalui teknik pengumpulan data tersebut, pendekatan kualitatif dapat membantu peneliti untuk menggali partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata, serta bagaimana partisipasi masyarakat dilihat sebagai proses pertukaran sosial. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi di lapangan, sekaligus membantu dalam mengeksplorasi bagaimana perbedaan partisipasi masyarakat setempat dalam pengembangan kampung budaya.

Disamping itu, untuk meneliti fenomena secara mendalam, peneliti menggunakan metode studi kasus yang berguna untuk mengeksplorasi suatu kasus dengan mengumpulkan data melalui berbagai sumber informasi yang

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017).

telah ditentukan.⁶¹ Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji sebuah peristiwa, program, aktivitas, ataupun sekelompok individu.⁶² Studi kasus membantu peneliti untuk memfokuskan perhatian pada satu unit kasus tertentu, yaitu masyarakat Kelurahan Petukangan Utara. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, metode studi kasus bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses pengembangan kampung budaya tersebut dan bagaimana pertukaran sosial yang terjadi dalam proses tersebut. Melalui deskripsi yang kaya dan analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami partisipasi masyarakat sebagai proses pertukaran sosial yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata.

1.7.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian terdiri dari beberapa informan atau narasumber, yang dipilih secara cermat berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian.⁶³ Informan ini adalah individu yang memiliki informasi berharga yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan keseluruhan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti

⁶¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih di antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), p. 135.

⁶² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), p. 4.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), p. 132.

menentukan informan berdasarkan 3 kategori.⁶⁴ Pertama adalah informan kunci, yaitu individu yang memiliki pengetahuan atas berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Kedua adalah informan utama, yang memiliki keterlibatan langsung dalam interaksi atau aktivitas sosial yang diteliti. Ketiga adalah informan pendukung, yang tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, namun dapat memberikan informasi tambahan yang dapat melengkapi atau memverifikasi data yang diperoleh dari informan kunci dan utama.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yang memiliki peran penting dalam topik penelitian. Mereka terbagi menjadi 1 orang informan kunci, 8 informan utama, dan 3 informan pendukung. Informan kunci adalah ketua pengurus desa wisata, yang memiliki wawasan mendalam terkait proses pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata sekaligus mengetahui faktor pendorong dan tantangan dalam proses tersebut. Untuk informan utama berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam perintisan desa wisata, yaitu 3 anggota dari pengurus desa wisata, tokoh masyarakat, pelaku seni Betawi, kelompok pemuda, dan pelaku UMKM Petukangan Utara. Sementara itu, informan pendukung datang dari 1 masyarakat umum Kelurahan Petukangan Utara, Sekretaris Kelurahan Petukangan Utara, dan Kepala Seksi Pemasaran dan Atraksi Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf)

⁶⁴ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), p. 72.

Jakarta Selatan. Melalui partisipasi dan kontribusi dari pihak yang terlibat, data yang relevan dan berkualitas dapat dikumpulkan untuk mendukung analisis dan kesimpulan yang akurat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pembahasan mengenai profil dari masing-masing informan.

Tabel 1.3 Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Status	Kategori
1.	N.H.	48 tahun	Ketua Pengurus Desa Wisata	Informan Kunci
2.	A.A.	46 tahun	Wakil Pengurus Desa Wisata	Informan Utama
3.	M.R.	27 tahun	Anggota Pengurus Desa Wisata	
4.	R.B.	21 tahun		
5.	M.S.	64 tahun	Tokoh Masyarakat Kelurahan Petukangan Utara	
6.	R.K.	42 tahun	Pelaku Seni Betawi Kelurahan Petukangan Utara	
7.	A.S.	18 tahun	Masyarakat Remaja Kelurahan Petukangan Utara	
8.	M.F.	49 tahun	Pelaku UMKM Kelurahan Petukangan Utara	
9.	R.D.	41 tahun	Masyarakat Umum Kelurahan Petukangan Utara	Informan Pendukung
10.	A.R.K.S.	39 tahun	Sekretaris Kelurahan Petukangan Utara	
11.	C.S.R.	39 tahun	Kepala Seksi Pemasaran dan Atraksi Sudin Parekraf Jakarta Selatan	

Sumber: Diolah dari Temuan Lapangan, 2025

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Petukangan Utara, tepatnya di Desa Wisata Kampung Budaya Silat Bekasi yang beralamatkan di Jalan

Ciledug Raya No. 46, RT.006/RW.004, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kampung ini dikenal sebagai pusat pelestarian seni bela diri tradisional Silat Beksi yang memiliki potensi budaya besar dalam konteks pengembangan desa wisata. Pemilihan lokasi ini didasarkan oleh relevansinya dengan topik penelitian, yaitu pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata. Desa wisata ini menawarkan kombinasi unik antara pelestarian budaya dan pengembangan desa wisata yang masih dalam tahap rintisan. Lokasi ini menjadi objek ideal untuk mengkaji partisipasi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dalam pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama periode dari bulan September 2024 hingga bulan Maret 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk memberikan peneliti kesempatan dalam melakukan eksplorasi lokasi penelitian secara menyeluruh dan setting sosial dari wilayah Petukangan Utara yang menjadi lokasi desa wisata. Periode penelitian yang cukup panjang juga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam terkait proses pengembangan desa wisata dari berbagai sudut pandang informan. Selain itu, waktu penelitian ini memberikan fleksibilitas untuk menjalin interaksi dengan masyarakat lokal, pengelola wisata, serta pemangku kepentingan, sehingga dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam. Dengan mengatur waktu penelitian secara tepat, peneliti dapat mengamati pertukaran sosial yang berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata.

1.7.4 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pengumpulan data, dan penulisan akhir. Peran peneliti dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang spesifik, serta merancang kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Dalam perencanaan, peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memudahkan peneliti dalam melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, peneliti juga menyusun rancangan penelitian yang mencakup langkah-langkah sistematis, seperti pengumpulan data, pemilihan informan, serta instrumen penelitian untuk memastikan hasil penelitian dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara komprehensif dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Selama masa penelitian berlangsung, peneliti perlu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang ada dan menjalin hubungan baik dengan partisipan. Peneliti melakukan serangkaian langkah metodologis, termasuk observasi langsung di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Peneliti juga mewawancarai berbagai pihak terkait atau pemangku kepentingan untuk membantu mendapatkan perspektif yang beragam dan informasi mendalam dari berbagai pihak. Selain itu, peneliti melakukan analisis dokumen atau data untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan. Peneliti memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara etis dan

partisipatif, dengan menjalin hubungan baik dengan informan dan menghormati nilai-nilai budaya yang ada.

Selanjutnya, dalam tahap penulisan, peneliti bertanggung jawab untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh secara sistematis. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk tulisan yang terstruktur, dengan dukungan data empiris yang kuat. Peneliti juga menginterpretasikan temuan penelitian dengan mengaitkannya pada konsep yang relevan. Dalam penulisan akhir, peneliti berupaya menyajikan temuan penelitian dengan bahasa yang jelas dan sistematis, sehingga penelitian dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca, masyarakat, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Peneliti juga memberikan kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu langkah penting dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali, memahami, dan menafsirkan makna yang mendalam dari fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian, yang meliputi observasi langsung, wawancara dengan informan, studi pustaka dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025, 14 Februari dan 18 Februari 2025 dengan metode tidak terstruktur, yaitu peneliti mengamati dan mencatat berbagai hal yang dianggap penting serta relevan

dalam penelitian, seperti kondisi desa wisata dan sekitarnya, kegiatan budaya pada desa wisata, tradisi atau kebiasaan masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dengan pengurus desa wisata. Observasi tidak terstruktur membantu peneliti agar lebih fleksibel dalam menangkap berbagai aspek yang muncul di lapangan tanpa terikat oleh pedoman observasi yang kaku, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan situasi yang lebih alami.

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara terstruktur dengan semua informan untuk memperoleh data yang lebih mendalam terkait dengan proses pengembangan kampung budaya, partisipasi masyarakat, serta pertukaran sosial yang melandasinya. Wawancara dengan wakil pengurus desa wisata, pelaku UMKM, pelaku kesenian, satu masyarakat remaja dan satu masyarakat umum Kelurahan Petukangan Utara dilakukan pada tanggal 30 Januari 2025, bertepatan dengan observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif dalam satu kesempatan. Peneliti juga melakukan wawancara terstruktur dengan Sudin Parekraf, Sekretaris Kelurahan Petukangan Utara, dan dua anggota pengurus desa wisata pada tanggal 14 Februari 2025 serta ketua pengurus desa wisata dan tokoh masyarakat Kelurahan Petukangan Utara pada tanggal 18 Februari 2025. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, serta pemahaman para informan terhadap topik atau isu yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih

kaya dan mendalam guna mendukung analisis yang akan dilakukan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data lainnya yang peneliti lakukan melibatkan studi pustaka atau kajian literatur dengan menelusuri berbagai artikel, jurnal, buku, serta sumber informasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta memahami berbagai perspektif akademik terkait topik yang dibahas dalam penelitian. Dalam prosesnya, referensi yang berkaitan dikaji secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian. Secara khusus, kajian literatur ini difokuskan pada topik-topik seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kampung budaya, konsep desa wisata, serta pertukaran sosial di antara masyarakat.

Sebagai langkah akhir, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menghimpun informasi dari berbagai dokumen internal yang dimiliki oleh kepengurusan desa wisata. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai catatan tertulis, laporan, arsip, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan proses pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih objektif dan akurat. Selain itu, teknik dokumentasi juga membantu dalam memahami berbagai aspek administratif dan operasional yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara atau observasi langsung. Dengan mengkombinasikan teknik

observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, hasil penelitian dapat lebih valid, akurat, dan relevan dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.7.6 Triangulasi Data

Triangulasi data pada penelitian ini berguna dalam memastikan keabsahan dari temuan yang didapatkan. Dengan menggunakan metode triangulasi data, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai teknik analisis untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil penelitian. Peneliti mengaplikasikan triangulasi sumber data dengan melibatkan wawancara dari berbagai tipe informan, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dari Ketua RW 04 Kelurahan Petukangan Utara untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari ketua pengurus desa wisata dan masyarakat Petukangan Utara. Hasil data yang diperoleh dari setiap informan berguna untuk memperkuat atau mengklarifikasi temuan penelitian.

Peneliti juga menerapkan triangulasi metode yang ditujukan untuk memperkaya validitas penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan termasuk wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Setiap metode ini memberikan perspektif yang berbeda, sehingga data yang diperoleh pun dapat saling melengkapi satu sama lain dan memperkaya hasil penelitian. Misalnya, wawancara dapat membantu peneliti mendapatkan

pandangan subjektif dari informan, sementara observasi memberikan gambaran faktual terkait fenomena di lapangan. Hasil data ini kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan yang dapat memperkuat kepercayaan terhadap validitas temuan. Dengan begitu, penelitian mampu menyajikan analisis yang kredibel dan representatif.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat lima bab yang membentuk kerangka keseluruhan penulisan. Kerangka ini dimulai dengan bagian pendahuluan yang memperkenalkan topik penelitian, diikuti oleh satu bagian yang menyajikan data empiris dan satu bagian analisis, serta diakhiri dengan satu bagian kesimpulan. Sistematika skripsi dapat dijabarkan sebagai berikut.

BAB I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah dan menguraikan dua permasalahan penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data juga disampaikan dengan rinci pada bab ini.

BAB II: Bab ini menyajikan profil Petukangan Utara sebagai sentra Kampung Budaya Silat Beksi, yang meliputi sejarah wilayah Petukangan Utara sebagai

kampung budaya serta kondisi masyarakat yang terbagi menjadi dua sub bab, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dan kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan Petukangan Utara.

BAB III: Bab ini akan menyajikan hasil temuan penelitian yang didapatkan saat turun lapangan, yang menyangkut pembahasan mengenai proses dari pengembangan Kampung Budaya Silat Beksi menjadi desa wisata. Peneliti juga menekankan pembahasan terkait dengan motivasi sosial di balik inisiatif masyarakat dalam mengembangkan kampung budaya menjadi desa wisata serta problematika yang dihadapi dalam proses pengembangan. Terakhir, peneliti akan menyertakan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian, yaitu terkait bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata.

BAB IV: Bab ini mengandung analisis terhadap hasil temuan di lapangan dengan konsep yang saling berkaitan. Peneliti akan menggunakan teori pertukaran sosial Peter M. Blau untuk menganalisis pertukaran sosial yang terjadi antara masyarakat dan pengurus desa wisata dalam pengembangan kampung budaya menjadi desa wisata dan ketidakseimbangan yang terjadi. Pembahasan dalam bab ini juga akan menyoroti bagaimana dampak pertukaran sosial terhadap keberlanjutan partisipasi masyarakat.

BAB V: Bab ini menjadi bagian penutup yang membahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, termasuk jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Peneliti juga akan menyampaikan saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang relevan di masa depan.

